

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid I*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2023. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pugung, Solahudin. 2021. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samsaimun. 2021. *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2023. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2021. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adinegoro, K.R.R. 2023. Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XIX, No. 1.
- Aditya, I Made dan Ni Putu Rai Yulianti. 2023. Digitalisasi Manajemen Pelayanan PPAT Berbasis Web. *Jurnal MERPATI*, Vol. 11, No. 1.

- Adjie, Habib. 2021. Tanggung Jawab Hukum PPAT atas Akta yang Dibuatnya dalam Konteks Hukum Pertanahan. *Notaire*, Vol. 4, No. 2.
- Al Qindy, Fatria Hikmatiar dan Febrihadi Suparidho. 2025. Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1.
- Arifin, Ridwan dan Siti Nurhalimah. 2022. Implikasi PP No. 18 Tahun 2021 terhadap Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2.
- Auliani, Intan Rifka dan Kholis Roisah. 2025. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan melalui Sertipikat Elektronik. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Az-zahra, Salsabilla dkk. 2025. Evaluasi Aplikasi Pemantauan Berkas untuk Modernisasi Layanan dan Penerbitan Dokumen Elektronik di Bidang Pertanahan. *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 5, No. 2.
- Azizah, Nur Azizah A. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Pihak yang Memberikan Keterangan Palsu. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Azizah, Nur. 2023. Data Pertanahan dan Kebijakan Publik. *Jurnal Agraria Indonesia*, Vol. 3, No. 2.
- Azizah, Siti Nur. 2023. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2.
- Berliani, Lintang dan Aji Fajar Suryo Antoro. 2023. Implementasi Kebijakan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Pati atas Pengecekan Sertifikat Tanah Berbasis Online. *JPAP: Jurnal Progress Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2.
- Diana, Bambang Agus dan Jayanti Armida Sari. 2024. Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 9, No. 2.
- Destriana, Arsyilla dan Tiurma Mangihut. 2022. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Administrasi Pertanahan melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Elora, Devi. 2024. Sertifikat Elektronik dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia: Kajian Yuridis terhadap Implementasi Digitalisasi Hak Milik. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Erfa, Riswan. 2020. Digitalisasi Administrasi Pertanahan untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, Vol. 10, No. 1.
- Fadilah, Dimas. 2025. Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2022. Etika Profesi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Fauzi, Ahmad. 2023. Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Fauzi, Muhammad. 2024. Asas Mutakhir dalam Digitalisasi Pertanahan. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 2, No. 2.
- Firmansyah, R. 2022. Pembaharuan Hukum Pendaftaran Tanah Pasca PP 18 Tahun 2021. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4, No. 1.

- Fuad, Ahmad Nur. 2022. Pencatatan Transaksi dalam Perspektif Hukum Islam Modern. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Handayani, Fitri. 2022. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. *Jurnal Agraria Modern*, Vol. 3, No. 1.
- Hartono, Rina Susanti. 2025. Efektivitas Layanan Pertanahan secara Digital di Kantor ATP/BPR Kota Bekasi. *Jurnal Kybernan*, Vol. 16, No. 1.
- Hernawati, Elly dan Risa Permata Dewi. 2021. Perubahan Mekanisme Kerja PPAT dalam Sistem Layanan Pertanahan Elektronik di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1.
- Hidayat, A.F. dan M. Rizki. 2023. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Layanan Pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 3.
- Hidayat, Dedi. 2023. Objek Pendaftaran Tanah. *Jurnal Pertanahan Nasional*, Vol. 4, No. 1.
- Hidayat, Rakhmad. 2023. Koordinasi BPN dan PPAT dalam Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 2.
- Hidayat, Rizal. 2023. Implikasi Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Pelayanan Pertanahan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Huda, Nurul. 2023. Digital Governance dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1.
- Irwan, Muhammad. 2021. Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqasid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No. 1.
- Kasta Arya Wijaya, I Ketut dan Putu Agus Susila Adnyana. 2025. Transformasi Digital Sertifikat Elektronik: Solusi dan Tantangan dalam Sistem Registrasi Tanah Modern di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 5.
- Kautsar Riza Salman. 2022. Islamic Accounting Perspective Based on QS Al-Baqarah 282. *Journal of Islamic Economics and Business Research*, Vol. 2, No. 1.
- Kholis, Nur. 2021. Sanksi Administratif terhadap PPAT dalam Perspektif Hukum Jabatan. *Al-Hakam: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Kurniawan. 2022. Administrasi Pertanahan dan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 27, No. 2.
- Kusmiarto dkk. 2025. Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan di Indonesia: Studi Kasus di Bogor, Sleman, dan Buleleng. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 5, No. 1.
- Lestari, Diah Ayu. 2023. Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah Pasca Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 9, No. 2.
- Lestari, Dwi Putri. 2023. Transformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Law Reform*, Vol. 19, No. 1.
- Lubis, Diana. 2025. Pelaksanaan Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik. *Jurnal Ilmiah Metada*, Vol. 7, No. 1.
- Lubis, Ikhsan dkk. 2024. Transformasi Digital dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum serta Transparansi Registrasi Tanah. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1.

- Maharani, Desak Komang Lina dan I Ketut Westra. 2022. Peran PPAT dalam Melakukan Pengecekan Sertifikat secara Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Tanah. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2.
- Maharani, Sinta. 2024. Sinergi PPAT dan BPN dalam Digitalisasi Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum dan Pelayanan Publik*, Vol. 5, No. 2.
- Marella, Clarabella dan Ana Silviana. 2024. Revolusi Digital dalam Urusan Pertanahan: Transformasi Sertifikat Tanah melalui Layanan Hipotek Elektronik. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 4, No. 4.
- Marlina, Rina. 2022. Pertanggungjawaban Pidana PPAT dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1.
- Maulana, Zainal. 2024. Implementasi Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Teknologi Pertanahan*, Vol. 4, No. 2.
- Miswanto, Agus dan Siti Fatimah. 2024. Profesionalisme dan Amanah dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Indonesian Journal of Maqasid Studies*, Vol. 2, No. 1.
- Muh Arif Suhattanto, Sarjita, Sukayadi, dan Dian Aries Mujiburohman. 2021. Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 2.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2021. Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7, No. 1.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2022. Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 8, No. 1.
- Nurhayati, Siti. 2021. Makna Yuridis Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Agraria. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1.
- Prasetya, Yoga. 2023. Integrasi Akta PPAT dalam Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 10, No. 2.
- Pratama, Yoga. 2024. Manajemen Data Objek Pertanahan Digital. *Jurnal Teknologi Informasi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Pratiwi, Yuliana. 2023. Modernisasi Layanan Pertanahan Berbasis Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 10, No. 1.
- Puspitasari, Dian. 2023. Kedudukan Akta PPAT sebagai Akta Autentik dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 38, No. 1.
- Putra, Hadi. 2022. Tujuan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1.
- Putra, Reza Andriansyah dan Atik Winanti. 2024. Urgensi dan Kendala dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2.
- Putri, Dwi Rahayu. 2022. Kewenangan Administratif BPN dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Era Hukum Publik*, Vol. 3, No. 1.
- Putri, Riska Amelia. 2023. Reformasi Administrasi Pertanahan melalui Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1.
- Rachman, F. 2023. Perlindungan Data dan Keamanan Sistem Informasi dalam Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Rahayu, S. dan A. Prasetyo. 2022. Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Implementasi Layanan Publik Berbasis Digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Rahmah, Nabila. 2024. Penyesuaian Praktik PPAT terhadap Regulasi Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1.
- Rahmah, Ummiati, Sehly dan Kamoru Sabitu. 2025. Bantuan Digital bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Pelaporan Hak Tanggungan secara Elektronik yang Efektif. *Jurnal Abdimas Cendekiawan Indonesia*, Vol. 2, No. 3.
- Rahmawati, N. 2024. Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Pati. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1.
- Redi, Ahmad. 2021. Penguasaan Negara atas Tanah dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1.
- Rizky, Arief. 2023. Tahapan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2.
- Salim, Agus. 2022. Integrasi Data Pertanahan dalam Sistem Administrasi Pertanahan Nasional. *Isquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 2.
- Santoso, Agus Budi. 2023. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2.
- Santoso, Agus. 2024. Tertib Administrasi Pertanahan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1.
- Santoso, Budi. 2021. Etika Profesi dan Prinsip Kehati-hatian PPAT. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3.
- Saputra, Andi. 2023. Dokumen Elektronik dalam Administrasi Pertanahan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 3.
- Sari, Dewi Kartika. 2022. Hubungan Kewenangan BPN dan PPAT dalam Administrasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Savira, Jennyola dan Gunawan Djajaputra. 2024. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Lembaga Pemerintah yang Memfasilitasi Kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik. *Journal of Law*, Vol. 4, No. 4.
- Septiani, Rani. 2023. Tanggung Jawab PPAT dalam Penyerahan Dokumen Elektronik Pendaftaran Tanah. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 4, No. 1.
- Silviana, Ana. 2021. Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, Issue 1.
- Sugianto, Fajar. 2022. Aksesibilitas Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1.
- Suhattanto, M.A. dkk. 2021. Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Bhumi*.
- Sulistyo, Roni. 2022. Eksistensi PPAT dalam Sistem Pendaftaran Tanah Digital. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1.
- Sumarna, Dadang dan Ayyub Kadriah. 2023. Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02.
- Supriyanti, Eka, Supriyadi, dan Zaenal Arifin. 2023. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2.

- Suryani, Lilis. 2023. Akta Otentik PPAT sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal Notariil*, Vol. 7, No. 2.
- Syahputra, Arman. 2023. Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik. *Jurnal Yuridika*, Vol. 38, No. 3.
- Syaifuddin, Ahmad. 2022. Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 1.
- Utami, D. dan B. Santoso. 2022. Peran PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Elektronik di Kabupaten Pati. *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 8, No. 1.
- Wibowo, Lilis. 2022. Pendaftaran Rumah Susun. *Jurnal Hukum Properti*, Vol. 2, No. 2.
- Yuliana, Rina. 2021. Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 2.
- Yulianti, Rina. 2021. Asas-Asas Pendaftaran Tanah. *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 9, No. 2.
- Yulianto. 2023. Tanggung Jawab Perdata PPAT atas Akta Cacat Hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Yusuf, Andi M. Reyza, Nia Kurniati, dan Yenni Yunithawati Rukmana. 2024. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Elektronik pada Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2.
- Yusuf, Andi M. Reyza. 2024. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Elektronik pada Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2.
- Zainuddin, Ahmad. 2022. Legalitas Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 3.

C. Skripsi, Tesis, dan Laporan

- Indrawaty, Sulistya. 2025. Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I). Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2023. Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023. Jakarta: Sekretariat Jenderal ATR/BPN.
- Lius, Muhammad Jeppry. 2024. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (E-Certificate) dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. Tesis Magister Kenotariatan.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

E. Sumber Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. <https://bphn.go.id/data/documents/98pp037.pdf>. Diakses sesuai catatan kaki naskah.

Hukumonline. 2025. Tujuh Problematika Profesi Notaris di Era Digital. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-problematika-profesi-notaris-di-era-digital-lt67a0cc9213731>. Diakses pada 14 Oktober 2025.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Matangkan Persiapan Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik. <https://kab-pati.atrbpn.go.id/berita/kantor-pertanahan-kabupaten-pati-matangkan-persiapan-verifikasi-buku-tanah-dan-surat-ukur-elektronik>. Diakses pada 14 Oktober 2025.

Mahkamah Agung RI. Transformasi Digital Pertanahan: Modernisasi dan Kepastian. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/transformasi-digital-pertanahan-modernisasi-dan-kepastian>. Diakses pada 12 Juni 2026.

F. Wawancara

Cristiana. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Pati. Wawancara pribadi, 10 Maret 2026, pukul 11.30 WIB.

Rekowarno. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Pati. Wawancara pribadi, 10 Maret 2026, pukul 13.00 WIB.

Selamet Riyadi. Kepala Bidang Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Wawancara pribadi, 26 Februari 2026, pukul 10.30 WIB.

Sri Ariyani. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Pati. Wawancara pribadi, 19 Februari 2026, pukul 11.00 WIB.